

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan Nasional adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat ke arah yang diinginkan, melalui kebijakan, strategi dan rencana. Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses transformasi masyarakat pada keadaan-keadaan yang lainnya, yang makin mendekati tata perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, yakni dua hal yang terdapat dalam pembangunan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), dimana diantara kedua hal tersebut memiliki ketertarikan yang menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya, sering kali, kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material. Pembangunan juga merupakan sebuah proses atau perjalanan yang menuju kearah perubahan yang lebih baik, serta melalui upaya yang dilakukan secara rinci dan terencana. Pembangunan Negara, seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan sering kali dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, yang mana pembangunan ekonomi menjadi salah satu pembangunan yang hingga saat ini masih dalam keadaan tidak stabil.

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah *development*, *modernization*, *westernization*, *empowering*, *industrialization*,

economic growth, europeanization, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan term *political change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang *multi-interpretable*, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004). Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu. (<http://baguspurnama.blogspot.com/2012/teori-teori-pembangunan-dalam.html>, tanggal 08 Januari, 2013, jam 10:46)

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa pembangunan ialah suatu langkah atau sebuah proses masyarakat dalam memajukan keadaan didalam kehidupan bermasyarakat. Ini menandakan bahwa pembangunan merupakan sebuah bagian dari kesejahteraan masyarakat itu sendiri, artinya bahwa, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seperti halnya, kepadatan penduduk, pengangguran, minimnya lapangan pekerjaan dalam suatu wilayah menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan dari pembangunan Negara tersebut. Sebab, dalam suatu wilayah yang permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, merupakan tanggung jawab oleh pemerintah dan yang seharusnya diperhatikan oleh pihak pemerintah lebih jeli dalam membuat suatu keputusan, jika kejadian ini tidak bisa ditanggapi oleh pemerintah, maka akan terjadi kemelaratan bagi masyarakat, dimana, kepadatan penduduk akan menyebabkan terjadinya pengangguran yang tinggi serta pemenuhan

kebutuhan yang semakin bertambah, menyebabkan mereka bisa saja bertindak kriminal dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk dalam suatu wilayah, ini diperlukan perpindahan penduduk dari wilayah yang kepadatan penduduknya sudah terlalu padat ke wilayah yang kepadatan penduduknya relatif masih jarang. Pemindahan penduduk ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi dalam hal pelaksanaannya banyak ,memiliki hambatan tantangan, dan bahkan kegagalan-kegagalan yang nantinya akan dialami oleh mereka ketika berada di lokasi pemukiman transmigrasi.

Di Indonesia proses pemindahan penduduk ini, dikenal dengan istilah “transmigrasi”. Yang lebih dikenal dengan migrasi dalam Negeri atau antar Daerah. Penyelenggaraan transmigrasi menurut Undang-Undang Nomor. 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, serta meningkatkan dan melakukan pemerataan pembangunan di daerah dan juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dari kebijakan mengenai ketransmigrasian di atas, jelas bahwa transmigrasi adalah suatu program yang sangat bijak dalam mengatasi masalah kependudukan.

Transmigrasi merupakan istilah untuk penduduk yang akan dipindahkan dari tempat mereka yang terlalu padat penduduknya ke wilayah yang kepadatan penduduknya belum terlalu padat atau biasa disebut dengan migrasi. Transmigrasi secara spesifiknya merupakan perpindahan penduduk dari wilayah yang terlalu padat penduduknya, ke wilayah yang kepadatan penduduknya masih cukup rendah dan

potensi alamnya masih melimpah dan masih belum digarap secara lebih intensif. Pola transmigrasi sebenarnya sudah cukup lama dikenal oleh bangsa Indonesia.

Sejarah transmigrasi di Indonesia telah mencapai satu abad lamanya. Dan pertama kali dilaksanakan pada tahun 1905 pada masa penjajahan Hindia Belanda. Peningkatan jumlah penduduk di pulau Jawa tersebut menyebabkan Pemerintahan kolonial Belanda mencari suatu cara untuk dapat mengatasi peningkatan penduduk yang terjadi di pulau Jawa ini dengan memindahkan penduduk secara besar-besaran dari pulau Jawa ke pulau lain yang penduduknya masih jarang, dengan efisiensi yang tinggi dan biaya yang dapat ditanggung oleh Negara. Program transmigrasi pada masa pemerintahan kolonial Belanda dikenal dengan nama kolonisasi pertanian. Pada masa itu, secara tidak langsung pemerintahan kolonial Belanda telah menerapkan pola transmigrasi sebelum Indonesia mengadopsi program perpindahan penduduk ini. Pemerintahan kolonial Belanda membawa banyak orang pribumi (terutama suku Jawa) untuk melakukan ekspansi ke pulau-pulau yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar seperti Sumatera dan Kalimantan. Orang-orang pribumi tersebut awalnya dipekerjakan sebagai pembantu dan pelayan, atau tukang kebun bagi orang-orang Belanda.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mulai menata ulang sistem kolonisasi yang dibangun oleh Belanda. Indonesia tidak lagi menggunakan nama kolonisasi pertanian melainkan di ganti dengan nama transmigrasi. Hal ini, bertujuan untuk menghilangkan bayang-bayang pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda yang selama

pemerintahannya dikenal dengan kekejaman. Perbaikan-perbaikan sistem antara lain dari tata cara pemindahan sarana dan prasarana yang di dapat didaerah tujuan, pelayanan yang diberikan pemerintah kepada para transmigran, serta jaminan kehidupan yang lebih baik didaerah tujuan transmigrasi. Jaminan yang diberikan salah satunya adalah setiap kepala keluarga (KK) diberikan unit rumah layak huni serta sawah/ladang sebagai tempat untuk mencari penghidupan.

Dari pengertian transmigrasi ini dapat dilihat bahwa tujuan utama dari program transmigrasi ini adalah untuk bisa menghindari pertumbuhan masyarakat yang terlalu membludak dan dapat mempengaruhi keseimbangan dari bangsa Indonesia, maka pemerintah melakukan program transmigrasi ini dalam rangka melakukan penyebaran penduduk yang merata ke seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, tujuan lain dari transmigrasi sesuai dengan konteks kehidupan bangsa Indonesia saat ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor informal, mengembangkan potensi sumber daya alam di daerah dan juga merupakan alternatif untuk mempertahankan keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam hal ini, guna mengatasi jumlah penduduk yang tinggi di dalam suatu wilayah pemerintah Indonesia mentransmigrasikan sebagian penduduk ke suatu wilayah yang jumlah penduduknya masih belum terlalu padat dan masih terdapat sumber daya alam yang bisa digarap. Hal ini dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi pengangguran serta kemiskinan dalam suatu wilayah, yang disebabkan oleh kepadatan penduduk yang tidak bisa dibendung lagi. Dengan demikian, dalam

mengatasi kepadatan yang berada dalam suatu wilayah di Indonesia, pemerintah mentransmigrasikan sebagian penduduk ke wilayah yang kepadatan penduduk belum terlalu padat, yakni di wilayah Gorontalo.

Wilayah Gorontalo merupakan wilayah yang baru saja menjadi sebuah Provinsi, yang memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Gorontalo mendeklarasikan Pemisahannya dari Provinsi SULUT, pada tanggal 23 Januari bertepatan dengan hari patriotik, Provinsi Gorontalo telah mendeklarasikan untuk memisahkan diri dari Provinsi SULUT, pada bulan Februari. Dengan kata lain, Provinsi Gorontalo baru 11 tahun berdiri setelah memisahkan diri dari Provinsi SULUT, dan juga penduduk Gorontalo belum terlalu padat penduduknya. Karena jumlah penduduk Gorontalo belum terlalu padat dan sumber daya alamnya masih banyak, pemerintah mentransmigrasikan sebagai masyarakat yang terlalu padat penduduknya ke Gorontalo, yang wilayahnya masih dapat menampung masyarakat transmigrasi. Adapaun yang menjadi target dalam menempatkan masyarakat transmigrasi ini yakni di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Sebelum masyarakat transmigran ini ditempatkan ke desa-desa di Kecamatan Wonosari, masyarakat transmigran ini masih akan di tampung di sebuah aula yang berada di kantor Kecamatan Wonosari, selama 2 hari untuk diseleksi. Tahap penyeleksian ini dilakukan, supaya pihak Pemerintah Kecamatan dapat mengetahui apakah masyarakat transmigran ini belum pernah menjadi masyarakat transmigran sebelumnya yang di tempatkan di Kecamatan Wonosari dan mana masyarakat

transmigrasi yang baru pertama kali di transmigrasikan di Kecamatan Wonosari. Setelah melalui tahap penyeleksian, barulah mereka di tempatkan di desa yang jumlah penduduknya masih kurang dan sumber daya alamnya masih banyak yang belum digarap. Desa Pangea, merupakan desa yang sangat strategis untuk menjadi tempatnya masyarakat transmigran ini, sebab Desa Pangea merupakan salah satu Desa yang kepadatan penduduknya masih dibidang belum terlalu padat dan memiliki sumber daya alam yang masih banyak belum digarap lebih intensif. Setelah beberapa tahun lamanya masyarakat transmigran menetap, Desa Pangea kini terbagai menjadi Pangea Sp1 dan Pangea Sp2. Adapun menjadi fokus penelitian ini, yakni warga masyarakat yang berada di Desa Pangea Sp2 Bukit Raya.

Desa Pangea Sp2 merupakan Desa yang penduduknya memiliki berbagai etnis atau suku. Walaupun demikian, dengan adanya perbedaan suku ini, tidak bisa menjadi sebuah tolak ukur dalam hal berkomunikasi dengan masyarakat yang beda sukunya atau masyarakat lokal, dalam artiannya, ketika masyarakat transmigran ini telah menetap pada suatu wilayah mereka akan menjadi bagian dari desa tersebut dalam hal pembangunan desa tersebut. Selo Soemardjan (dalam Hedebro, Goran. 1993:29), menyatakan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. Artinya bahwa, ketika seorang pendatang telah menetap lama dalam suatu wilayah dan telah memiliki identitas diwilayah tersebut, maka dia telah menjadi bagian dari masyarakat di wilayah tersebut. Pada dasarnya, manusia ialah mahluk sosial dimana, manusia tidak dapat hidup sendiri dalam dunia ini.

Hal ini, berbanding terbalik dengan masyarakat transmigran dengan masyarakat lokal atau penduduk asli Pangea, walaupun interaksi di antara mereka ada, akan tetapi itu tidak seperti halnya mereka berinteraksi dengan sesama mereka atau dengan sama suku, interaksi yang terjadi dengan lain suku hanya merupakan suatu interaksi yang biasa saja, sebab masyarakat transmigran ini masih merasa enggan dengan mereka penduduk asli Pangea Sp2 ini. Ini menyebabkan terjadinya misinteraksi di antara mereka, hanya karena persoalan ketidakyamanan untuk berinteraksi dengan lain suku..

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pola kehidupan ,masyarakat transmigrasi di Desa Pangea Sp2 Bukit Raya?
2. Bagaimana hubungan masyarakat transmigrasi dengan masyarakat lokal?

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi ialah “Bagaimana pola kehidupan masyarakat transmigrasi di desa Pangea Sp2 Bukit Raya”

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pola kehidupan masyarakat transmigran di desa Pangea Sp2 Bukit Raya.
2. Untuk mengetahui Bagaimana hubungan masyarakat transmigran dengan masyarakat lokal.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan sebagai pembandingan bagi para peneliti serta peminat.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat sekitar kita.
2. Melalui penelitian ini, penulis dapat memperoleh pengalaman ataupun pengetahuan tentang penelitian sebagai realisasi tanggung jawab mahasiswa terhadap darma perguruan tinggi khususnya darma penelitian .
3. Sebagai bahan referensi selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten Boalemo, penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Wonosari untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat membangun daerahnya guna untuk kepentingan bersama khususnya pada masyarakat.